

# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul

Halaman

: Gedung Baru : Alasan DPR Sulit Diterima Publik

**Tanggal** 

: Minggu, 13 Agustus 2017

**Surat Kabar** 

: Kompas

### **GEDUNG BARU**

## Alasan DPR Sulit Diterima Publik

JAKARTA, KOMPAS - Alasan yang disampaikan anggota De-wan Perwakilan Rakyat untuk membangun gedung baru masih sulit diterima publik. Terlebih, kinerja DPR periode sekarang

kinerja DPR periode sekarang dinilai yang terburuk sepanjang sejarah lembaga perwakilan. Menurut peneliti di Indonesia Corruption Wateh (ICW), Donal Fariz, Sabtu (12/8), di Jakarta, alasan DPR membangun gedung baru sangat sulit untuk diterima publik mengingat kinerja buruk mereka Terlebih keinginan DPR mereka. Terlebih keinginan DPR membangun gedung baru terjadi pada saat banyak subsidi untuk pada saat banyak subsidi untuk rakyat pun dipotong pemerintah. "Sepanjang sejarah lembaga pe-rwakilan, DPR periode saat ini yang terburuk. Di tengah kerja dan citra DPR yang buruk, sulit bagi publik bisa mendukung ren-cana DPR," kata Donal. Disebut terburuk karena DPR dinilai menghabikan banyak

dinilai menghabiskan banyak waktu untuk berebut jabatan pa-da awal periode DPR. DPR juga gagal menjalankan fungsinya. Sa-lah satunya terlihat dari kinerja legislasi yang selalu jauh dari target. Adapun fungsi pengawas an DPR, kata Donal, justru di-gunakan untuk menyerang agenda pemberantasan korupsi ngan disetujuinya hak angket ter-hadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditambah lagi dipimpin tersangka

korupsi. "Apalagi kondisi keuangan negara sekarang sedang tidak sehat. Subsidi untuk rakyat banyak dipotong pemerintah dan rakyat bisa jadi tidak setuju kalau pe-motongan subsidi untuk mereka ternyata untuk membangun fa-silitas-fasilitas bagi DPR yang ti-dak mendesak kebutuhannya," tutur Donal.

Jika DPR tidak membatalkan rencana penataan kawasan tersebut, dia mendorong pemerin-tah untuk menolak usulan DPR.

### Tidak nyaman

DPR tetap menginginkan ge dung baru, mengingat kondisi gedung sekarang tidak cukup men-dukung kerja mereka. "Setiap berada di Gedung Nusantara I (tempat ruangan anggota DPR berada), kami ini selalu *sport* jan-tung. Takut gedungnya roboh atau liftnya anjlok. Ditambah lagi kerja tenaga ahli dan adminis-trasi kami tidak nyaman karena harus bekerja di ruangan yang sempit," ungkap Sekretaris Frak-si Partai Hanura DPR Dadang

si Partai Hanura DPR Dadang Rusdiana. Seperti diberitakan sebelum-nya, setiap anggota DPR memiliki tiga tenaga ahli dan dua tenaga administrasi. Mereka harus be-kerja di ruangan berukuran 4 meter x 2 meter dari total ukuran ruangan setiap anggota DPR 4 meter x 6 meter. Sementara perluasan ruangan tak memungkin-Nusantara I sudah digunakan.
"Padahal, tenaga ahli itu penting bagi anggota DPR. Jadi, wajar jika

bagi anggota DFR. Jadi, walai lika mereka juga harus nyaman be-kerjanya," katanya. Kondisi ini yang jarang di-ketahui publik sehingga wajar jika setiap kali muncul rencana pembangunan gedung baru, gedung baru, ncul. "Padahal, muncul.

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

## Alasan DPR Sulit Diterima Publik

(Sambungan dari halaman 1)

perlunya gedung itu tak meng-ada-ada. Silakan saja datang dan

lihat sendiri," ujar Dadang. Terlebih, katanya, gedung baru yang dikehendaki bukan gedung yang mewah. Gedung yang di-butuhkan setidaknya memadai untuk anggota DPR beserta tenaga ahli dan administrasi agar bisa bekerja nyaman. "Kalau gedung yang dibuat nanti ternyata gedung mewah dengan fasilitas yang sebenarnya tak dibutuhkan DPR, saya jelas tidak akan se-

pakat," ujarnya. Wakil Ketua Fraksi Partai De gedung, termasuk ruangan gota DPR mokrat DPR Herman Khaeron gedung, termasuk ruangan anggota DPR yang lebih layak, juga untuk kepentingan negara. Selain itu, DPR periode selanjutnya akan bertambah 15 anggota sehingga total nantinya berjumlah 575 anggota DPR.

"Jadi, gedung itu bukan untuk anggota DPR saat ini. Anggota DPR saat ini Anggota DPR saat ini justru kemungkinan tidak bisa menikmatinya karena kalau pembangunan direalisasi-

kan, bisa jadi baru selesai setelah

kan, bisa jadi baru selesai setelah masa jabatan kami berakhir ta-hun 2019," jelasnya.

Menurut Dadang, kondisi ge-dung yang tak lagi layak, ditam-bah pentingnya gedung baru un-tuk kepentingan negara itu, mi-nim dijelaskan kepada publik. Ja-di tidak mangherankan pendadi, tidak mengherankan peno-lakan selalu muncul setiap kali ada rencana pembangunan. Karena itu, dia mendesak Se-kretariat Jenderal DPR lebih in-tens mengomunikasikannya ke-

pada publik. Tidak sebatas rencana pembangunan gedung baru,

tetapi juga termasuk fasilitas lain tetapi juga termasuk fasilitas lain yang masuk konsep penataan ka-wasan parlemen, seperti perpustakaan, museum, alun-alun tempat masyarakat berunjuk rasa, dan apartemen. Sarana dan prasarana ini dinilai Dadang penting untuk membuat parlemen yang modern modern.

Untuk meyakinkan publik bahwa DPR tak ada niat meraup untung dari pembangunan, Herman dan Dadang setuju jika pem-bangunannya diserahkan sepe-nuhnya kepada pemerintah. KPK bisa ikut mengawasi. (APA)